

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Anang Firmansyah. 2019. *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*. CV. Penerbit Qiara Media. Surabaya.
- Anggar Sigit Pamukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Djoko Imbawani Atmadjaja. 2011. *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian dan Prinsip – Prinsip Hukum Dagang)*. Setara Press. Malang.
- Eli Wulia Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Nomensen Sinamo. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Philippus M Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Universitas Gadjah Mada Press. Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Tri Budiyo. 2010. *Hukum Dagang Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum*. Griya Media. Salatiga.

Jurnal dan Skripsi

AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia*. Jurnal Kertha Desa. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 8 Nomor 7 Tahun 2020

Ali Maswan Hsb dan Evlyn Martha Julianthy. 2018. *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15 No. 2 juli 2018.

Amiruddin. 2016. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Terminal Regional Day*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Athaya Modina. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Beredar Secara Online*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Louis Yulios. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen*. Jurnal Lex Pravatum. Universitas Sam Ratulangi. Vol. I. Nomor 3 Juli 2013.

Sufriadi. *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Yuridis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Vol. 1 No. 1 Juni 2014.

Website

Ambaranie Nadia Kemala Movanita. 2019. <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/11/084326826/kualitas-di-bawah-standarproduksi-jadi-alasan-indonesia-harus-impor?page=all>. Diakses pada 11 Januari 2021

Aris Kurniawan. 2021. *Pengertian Sanksi Hukum (Pidana, Perdata dan Administrasi) serta macamnya*. <https://www.gurupendidikan.co.id/sanksi-hukum/#:~:text=Sanksi%20hukum%20merupakan%20hukuman%20yang,dalam%20memaksakan%20ditaatinya%20suatu%20hukum>. Diakses pada 17 Mei 2021

Guru Ekonomi. 2020. *Label Produk*. <https://sarjanaekonomi.co.id/label-produk/>. Diakses pada 23 Februari 2020

Munjiyah Dirga Ghazali. 2020. <https://makassar.tribunnews.com/2020/02/06/dinasperdagangan-pangkep-temukan-ratusan-barangkada>

luarsa-selama-2019-makanan-ada-107-produk. Diakses pada 8 November 2020

Shanti Rachmadsyah. 2010. *Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif)*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/>. Diakses pada 16 Mei 2021

Wikipedia. 2017. *Sanksi*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi>. Diakses pada 17 Mei 2021

Wikipedia. 2020. *Perabot Rumah*. https://id.wikipedia.org/wiki/Perabot_rumah#:~:text=Sebuah%20perabot%20rumah%2C%20perabot%20domestik,%2C%20membersihkan%2C%20dan%20mengan%20makanan. Diakses pada 22 Mei 2021

Wikipedia. 2021. *Indonesia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>. Diakses pada 22 Mei 2021

Perundang-Undangan dan Aturan Lain-lain

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 11/BC/2005 Tentang Jalur Prioritas

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai

Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sultan Hasanuddin ☎0410) 21200 Ext 146 Pangkajene

Pangkajene, 23 Juni 2021

K e p a d a,

Nomor : 070/ 218 /VI/ BKBP/2021
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth Kepala DPM-PTSP
Kab. Pangkep
Di-

Pangkajene

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 218 /VI/ BKBP/2021

- D a s a r :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 4714/UN4.5.3/PT.00/2021 Tanggal 18 Juni 2021 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam surat tersebut, maka pada prinsipnya Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak keberatan dan menyetujui memberikan Rekomendasi kepada :

- a. Nama : **NUR INDAH PRATIWI**
- b. No. Pokok : B021171308
- c. Program Studi : Hukum administrasi Negara
- d. Alamat : Tekolabbua

Bermaksud akan melakukan Penelitian di Wilayah Kab.Pangkep dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL BAHASA INDONESIA DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN"

Demikian Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,



TEMBUSAN : Kepada Yth

1. Bupati Pangkep di Pangkajene;
Sdr(i) NUR INDAH PRATIWI;
----- Peringgal-----



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 226/IPT/DPMPTSP/VIII/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : NUR INDAH PRATIWI
Nomor Pokok : B021171308
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene / 05 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tekolabbua Kel/ Desa Tekolabbua Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti : Dinas Perdagangan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Survey dengan Judul :

“Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”

Lamanya Penelitian : 22 Juli 2021 s/d 20 Agustus 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 12 Agustus 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);
2. Kepala Kantor Kesbang;
3. Arsip



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(Official stamp and signature area)

Drs. Bachtiar, M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19760930 199511 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

Nomor : 6626/UN4.5.3/PT.00/2021

Lampiran : -

Hal : **PENELITIAN**

Makassar, 03 Agustus 2021

Kepada

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulawesi Selatan
di,-
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : NUR INDAH PRATIWI

No. Pokok : B021171308

Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara

Alamat : Tekolabbua

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Marten Arie ,SH.,MH

2. Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin ,SH.,MH

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL BAHASA INDONESIA DI KOTA MAKASSAR

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni,
dan Kemitraan,



Dr. Muh. Hasrul SH.,MH

NIP. 19810418 200212 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

Nomor : 6626/UN4.5.3/PT.00/2021

Makassar, 03 Agustus 2021

Lampiran : -

Hal : **PENELITIAN**

Kepada

Yth. : Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
di,-
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : NUR INDAH PRATIWI
No. Pokok : B021171308
Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara
Alamat : Tekolabbua

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Marten Arie ,SH.,MH
2. Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin ,SH.,MH

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL BAHASA INDONESIA DI KOTA MAKASSAR

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni,
dan Kemitraan,



Dr. Muh. Hasrul SH.,MH

NIP. 19810418 200212 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;



